



Perilaku Masyarakat dalam Menanggapi Kebijakan Rehabilitasi Pascabencana Seroja di Kelurahan Oebufu

Stella Maris Engeline Amaina^{1*}, Maria M. Lino², Delila Angelin N. Seran³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Nusa Cendana

¹enjellamaina@gmail.com

²marialino@staf.undana.ac.id

³delila.seran@staf.undana.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam menyikapi kebijakan rehabilitasi pascabencana Siklon Tropis Seroja di Kelurahan Oebufu, khususnya pada masyarakat yang tinggal di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Liliba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai respon masyarakat terhadap kebijakan rehabilitasi yang diterapkan pemerintah, mulai dari sikap proaktif hingga pasif, tergantung pada tingkat pemahaman, pengalaman terdampak, dan akses informasi. Selain itu, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi, seperti ketimpangan distribusi bantuan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan rehabilitasi sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat serta komunikasi yang transparan antara pihak pemerintah dan warga terdampak.

Kata Kunci: DAS Liliba, Kebijakan Rehabilitasi, Perilaku Masyarakat, Partisipasi Warga, Siklon Seroja

Abstract

This study aims to explore community behavior in responding to the post-disaster rehabilitation policy following Tropical Cyclone Seroja in Oebufu Sub-district, with a focus on residents living in the Liliba River Basin (DAS Liliba) area. The research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, with informants selected purposively. The findings reveal varying community responses to the rehabilitation policy, ranging from proactive to passive, depending on the level of understanding, the extent of impact, and access to information. Challenges were identified in the implementation process, including unequal aid distribution and limited community involvement in planning. The study concludes that the success of rehabilitation policies heavily depends on active community participation and transparent communication between the government and affected citizens.

Keywords: *Citizen Participation, Community Behavior, Cyclone Seroja, Liliba River Basin, Rehabilitation Policy*

1. Pendahuluan

Penanggulangan bencana merupakan aspek krusial dalam pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa bencana dapat berasal dari faktor alam, non-alam, maupun ulah manusia yang mengancam keselamatan jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan gangguan psikososial. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan penanggulangan bencana melalui tahapan menyeluruh, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang memuat rincian teknis pelaksanaan di setiap tahap manajemen bencana.

Tahapan manajemen bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap pra-bencana, pemerintah berkewajiban melakukan pemetaan daerah rawan, sosialisasi kepada masyarakat, serta memperkuat sistem peringatan dini dan infrastruktur. Saat tanggap darurat, fokus utama adalah penyelamatan jiwa, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara itu, pada fase pascabencana, langkah yang ditempuh adalah penyediaan bantuan darurat, pendataan kerusakan, hingga rehabilitasi fisik dan sosial. Implementasi kebijakan di setiap fase sangat menentukan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana jangka pendek maupun jangka panjang.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan terhadap bencana hidrometeorologis. Peristiwa Siklon Tropis Seroja pada April 2021 menjadi salah satu bencana paling merusak dalam sejarah provinsi tersebut. Berdasarkan data BPBD Kota Kupang, tercatat 22.748 kepala keluarga (KK) atau sekitar 113.740 jiwa terdampak secara langsung. Selain itu, terjadi kerusakan pada ribuan rumah dengan tingkat kerusakan bervariasi: 21.290 unit rusak ringan, 874 rusak sedang, dan 584 rusak berat. Salah satu wilayah yang terdampak paling parah adalah RT 10 Kampung Amanuban di Kelurahan Oebufu, di mana 45 KK kehilangan tempat tinggal karena tanah longsor dan retakan tanah yang terjadi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).

Sebagai bentuk intervensi pascabencana, Pemerintah Kota Kupang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah. Peraturan ini mengatur pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH), serta skema rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat terdampak, yang sejalan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan di tingkat komunitas, baik dari sisi administratif, logistik, maupun respons masyarakat sebagai penerima manfaat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku masyarakat dalam menanggapi kebijakan rehabilitasi pascabencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang pasca Siklon Tropis Seroja, dengan fokus pada respon, partisipasi, serta persepsi masyarakat terdampak di Kelurahan Oebufu terhadap program bantuan stimulan perumahan. Melalui penelitian ini, akan ditelaah bagaimana masyarakat memahami, menyikapi, dan terlibat dalam implementasi kebijakan

tersebut, serta bagaimana tindakan mereka mencerminkan tingkat keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi di wilayah rawan bencana.

Untuk memperkuat posisi dan urgensi penelitian ini, beberapa studi terdahulu dijadikan rujukan perbandingan. Penelitian Cahyadi Adiwijaya (2017) meneliti pengaruh pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana tanah longsor di Kota Bogor. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya faktor kognitif dalam menghadapi bencana, tetapi hanya berfokus pada fase pra-bencana, sedangkan penelitian ini berfokus pada fase pascabencana dan respons masyarakat terhadap kebijakan rehabilitasi.

Selanjutnya, Wahyuni (2018) meneliti implementasi kebijakan relokasi pasca-erupsi Gunung Sinabung dengan fokus pada tantangan dari sisi pemerintah, seperti komunikasi, koordinasi, dan sumber daya. Penelitian ini berbeda karena melihat dari perspektif masyarakat sebagai penerima kebijakan, untuk mengetahui bagaimana perilaku mereka terbentuk berdasarkan pengalaman langsung terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian Pramono dan Suranto (2021) tentang partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana di Kota Surakarta juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat paling menonjol pada tahap tanggap darurat, dan masih rendah pada fase pra dan pascabencana. Temuan ini memperkuat urgensi penelitian yang sedang dilakukan, yaitu untuk mengkaji perilaku masyarakat pascabencana, khususnya dalam merespons dan menyesuaikan diri terhadap intervensi kebijakan rehabilitasi pasca Siklon Tropis Seroja.

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa celah penelitian (*research gap*) yang ingin diisi adalah minimnya kajian yang secara spesifik membahas perilaku masyarakat terdampak dalam merespons kebijakan rehabilitasi pascabencana dalam konteks bencana besar, seperti Siklon Tropis Seroja. Penelitian ini mengangkat perspektif masyarakat secara lokal di Kelurahan Oebufu dan menggunakan pendekatan partisipatoris untuk memahami secara mendalam bagaimana masyarakat memaknai, merespons, serta berperilaku terhadap kebijakan pemerintah dalam fase pemulihan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyusun strategi kebijakan pascabencana yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak, serta mendorong model rehabilitasi yang berbasis pada pengalaman komunitas lokal.

2. Tinjauan Pustaka

a. Teori Perilaku

Teori perilaku (*behavioral theory*) menjelaskan bahwa respons individu atau kelompok terhadap suatu stimulus dipengaruhi oleh pengalaman, penguatan, dan kondisi lingkungan. Dalam konteks kebijakan rehabilitasi pascabencana, perilaku masyarakat dipahami sebagai bentuk respons terhadap kebijakan pemerintah yang hadir sebagai stimulus eksternal. Menurut Skinner (1953), perilaku manusia dapat dimodifikasi melalui proses penguatan (*reinforcement*) dan hukuman (*punishment*), di mana respons positif terhadap kebijakan muncul jika masyarakat memperoleh pengalaman manfaat yang konkret, seperti bantuan cepat, akses infrastruktur, atau kejelasan informasi.

Penerapan teori ini dalam analisis respons masyarakat terhadap kebijakan rehabilitasi di Kelurahan Oebufu memungkinkan peneliti memahami bagaimana pengalaman sebelumnya, persepsi keadilan distribusi bantuan, serta kehadiran aparat pemerintah membentuk perilaku

penerimaan atau resistensi. Watson (1913) juga menegaskan bahwa perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan, sehingga bentuk keterlibatan masyarakat dalam program rehabilitasi dapat ditelusuri dari pola stimulus-respons yang terbentuk pascabencana.

Dalam situasi pascabencana, perilaku kolektif masyarakat sering kali dipengaruhi oleh ketidakpastian, trauma, dan ekspektasi terhadap peran negara. Maka, ketepatan strategi komunikasi dan tindakan nyata dari pemerintah dapat menjadi penguat perilaku kooperatif masyarakat. Teori ini relevan untuk mengkaji bagaimana persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap proses rehabilitasi menentukan sikap partisipatif atau pasif mereka terhadap kebijakan yang dijalankan.

b. Siklon Tropis Seroja

Siklon tropis merupakan salah satu fenomena cuaca ekstrem yang terbentuk akibat adanya pusat tekanan rendah di atas permukaan laut yang hangat, memicu terbentuknya sistem konvektif dan awan dalam skala besar. Gaya Coriolis berperan penting dalam menciptakan gerak pusaran dari sistem awan tersebut, yang bergerak ke arah barat atau barat laut. Karena pengaruh lintang terhadap gaya Coriolis, pembentukan siklon tropis biasanya tidak terjadi di wilayah dekat ekuator, melainkan pada lintang lebih dari 10°, baik di utara maupun selatan ekuator (Haryani, 2012). Oleh karena itu, Indonesia bukan merupakan wilayah pembentukan siklon tropis, tetapi tetap dapat terdampak secara tidak langsung karena berada dekat dengan wilayah lintasan siklon tropis.

Salah satu peristiwa yang menunjukkan dampak nyata dari siklon tropis di wilayah Indonesia adalah Siklon Tropis Seroja, yang terjadi pada April 2021 dan berdampak signifikan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Meskipun tidak terbentuk langsung di atas wilayah Indonesia, siklon ini memberikan pengaruh besar berupa angin kencang, hujan ekstrem, dan gelombang tinggi yang menyebabkan banjir bandang, longsor, hingga kerusakan infrastruktur secara luas.

Menurut Syaifullah (2015), pemantauan sistem siklon tropis sangat penting dilakukan, terutama karena pengaruhnya terhadap cuaca buruk yang meluas, termasuk hujan intensitas tinggi dan gelombang laut yang ekstrem. Siklon seperti Seroja juga berpotensi menyebabkan fenomena *storm surge* atau gelombang badai, yang bisa meningkatkan permukaan laut secara tiba-tiba dan membahayakan kawasan pesisir. Oleh karena itu, sistem peringatan dini dan koordinasi penanggulangan bencana menjadi krusial untuk meminimalisasi risiko dan dampak terhadap masyarakat.

c. Konsep Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui tindakan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Di tingkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan teknis serta memberikan dukungan bagi pemerintah daerah dalam mengelola risiko bencana secara menyeluruh. Selain itu, BPBD juga bertugas mengatur logistik, fasilitas, serta administrasi pendukung agar penanggulangan bencana berjalan efektif (BPBD, 2020). Infrastruktur fisik seperti sistem transportasi, pengairan, dan bangunan publik juga menjadi bagian penting dalam kerangka kesiapsiagaan bencana guna menjamin kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama dan pasca bencana.

d. Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat dan menyebabkan kerusakan, baik akibat faktor alam, non-alam, maupun manusia. Bencana dikategorikan menjadi tiga jenis utama, yaitu bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, dan angin topan), bencana non-alam (termasuk kegagalan teknologi dan epidemi), serta bencana sosial (misalnya konflik dan kerusuhan) (UU No. 24/2007). Dampak dari bencana tidak hanya berupa kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga meliputi kerugian ekonomi, gangguan sosial, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat.

BPBD memiliki tugas strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari menetapkan pedoman kebijakan, menyusun peta rawan bencana, hingga mengendalikan distribusi bantuan dan melaporkan kondisi penanganan bencana secara berkala kepada pemerintah daerah (BPBD, 2020; UU No. 24/2007). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan secara adil, efektif, dan terpadu, serta mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan selama proses pencegahan hingga rekonstruksi.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* dengan desain deskriptif eksploratif, yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran utuh mengenai perilaku masyarakat dalam menanggapi kebijakan rehabilitasi pascabencana Seroja di Kelurahan Oebufu, khususnya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Liliba. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2025. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara holistik melalui interaksi antara tempat, pelaku, dan aktivitas sosial (Sugiyono, 2013), sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendukung analisis melalui data numerik dari kuesioner.

Fokus penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) pengetahuan yang meliputi pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan rehabilitasi, (2) sikap yang mencakup tanggapan dan rasa tanggung jawab terhadap implementasi kebijakan, serta (3) praktik atau tindakan masyarakat dalam bentuk penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan tersebut. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah 15 orang, terdiri dari lurah, ketua RT, dan warga terdampak yang dianggap mampu memberikan informasi relevan (Sugiyono, 2013).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yakni: observasi nonpartisipatif (Satori & Komariah, 2010), wawancara terstruktur mendalam (Esterberg, 2020; Moleong, 2002), kuesioner tertutup untuk memperoleh data kuantitatif dasar, serta dokumentasi terhadap arsip kebijakan dan laporan kegiatan rehabilitasi. Studi pustaka juga dilakukan untuk memperkuat kerangka teoritik dan kontekstual analisis.

Data dianalisis secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang seluruhnya diuji validitasnya menggunakan triangulasi data, sumber, dan metode guna menjamin keandalan dan kredibilitas hasil penelitian (Yusuf, 2014). Pendekatan *mixed method* ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengaitkan dimensi subjektif masyarakat (melalui data kualitatif) dengan kecenderungan umum atau pola respons (melalui data kuantitatif).

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkap bahwa perilaku masyarakat Kelurahan Oebufu, khususnya di wilayah DAS Liliba, dalam menyikapi kebijakan rehabilitasi pasca bencana Siklon Tropis Seroja sangat bervariasi. Sebagian masyarakat menunjukkan sikap positif dengan berpartisipasi aktif dalam program-program rehabilitasi yang dijalankan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait. Namun, ada juga kelompok yang bersikap pasif bahkan menolak kebijakan tersebut, terutama karena ketidakpuasan terhadap pelaksanaan yang dianggap belum optimal dan kurang transparan. Fenomena ini menggambarkan adanya gap antara harapan masyarakat dengan realitas pelaksanaan kebijakan. Pemerintah perlu memperbaiki komunikasi dan transparansi pada setiap tahapan proses rehabilitasi agar masyarakat merasa dilibatkan dan tidak terabaikan. Faktor ekonomi muncul sebagai hambatan utama, di mana masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung merasa kurang diperhatikan karena fokus kebijakan lebih condong pada rehabilitasi infrastruktur dan program jangka panjang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Selain itu, keterbatasan informasi dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan rehabilitasi juga memengaruhi respons mereka. Oleh karena itu, sosialisasi yang intensif dan kontekstual sangat diperlukan agar masyarakat memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat kebijakan yang diterapkan.

Menurut Notoatmodjo (2012), perilaku merupakan respons individu terhadap stimulus dari lingkungan, yang dipengaruhi oleh karakteristik pribadi atau determinan perilaku. Bloom (dalam Notoatmodjo, 2012) membagi ranah perilaku manusia ke dalam tiga domain: kognitif, afektif, dan psikomotor, yang memiliki relevansi dalam memahami respons masyarakat terhadap kebijakan.

a. Pengetahuan

Pengetahuan masyarakat adalah hasil penginderaan yang dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek tertentu (Notoatmodjo, 2012). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014), pengetahuan didefinisikan sebagai sesuatu yang diketahui melalui proses pembelajaran, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi dan faktor eksternal seperti sarana informasi dan kondisi sosial budaya (Agus, 2013).

Perbedaan penting antara pengetahuan dan pemahaman adalah bahwa pengetahuan lebih bersifat informasi yang tersimpan dalam memori jangka pendek, sementara pemahaman adalah kemampuan mengaitkan informasi sehingga tersimpan dalam memori jangka panjang dan lebih tahan lupa.

Pemahaman

Pemahaman masyarakat terhadap program rehabilitasi terlihat dari kemampuan mereka mengolah informasi yang diterima. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Oebufu, Bapak Zet Batmalo, SH., MH (7 Maret 2025), dikemukakan bahwa pemerintah telah melakukan edukasi dan sosialisasi sebelum dan setelah bencana, termasuk pendirian posko evakuasi dan bantuan berbasis kategori kerusakan rumah.

Wawancara dengan Ketua RT 10, Bapak Konstan (10 Maret 2025), menegaskan peran aktif RT dalam menyampaikan informasi dan membantu pelaksanaan program rehabilitasi. Namun, masih ada warga yang belum sepenuhnya memahami atau menerima program relokasi karena keterbatasan lahan dan lokasi pekerjaan yang jauh.

Hal serupa diungkapkan Ketua RT 12, Bapak Samuel Kase, dan warga lainnya seperti Bapak Lamber (11 Maret 2025) yang menyatakan ketidakpuasan terkait luas lahan di lokasi relokasi dibandingkan dengan tempat tinggal sebelumnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap program rehabilitasi belum merata. Kesalahan komunikasi dan minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan menyebabkan kesenjangan pemahaman, yang berimplikasi pada sikap pasif atau penolakan terhadap program.

Dalam konteks teori komunikasi pembangunan, keberhasilan suatu program sangat bergantung pada komunikasi yang partisipatif dan dialogis, bukan komunikasi satu arah (Rogers, 2003). Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama untuk memastikan program diterima dan berjalan efektif (Pretty, 1995). Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilakukan dengan pendekatan kontekstual yang melibatkan tokoh masyarakat dan media lokal yang mudah diakses.

Kesadaran

Kesadaran masyarakat merujuk pada pengakuan dan pemahaman mereka terhadap pentingnya kebijakan rehabilitasi pasca-bencana. Lurah Oebufu dan Ketua RT 10 menegaskan peran mereka dalam meningkatkan kesadaran melalui koordinasi, sosialisasi rutin, dan keterlibatan tokoh lokal. Namun, wawancara dengan warga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah. Banyak yang menganggap bencana sebagai peristiwa biasa dan tidak membangun sikap waspada atau kesiapsiagaan untuk masa depan.

Teori Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh sikap yang lemah terhadap mitigasi bencana, kurangnya tekanan sosial, dan minimnya rasa percaya diri untuk bertindak preventif.

Menurut teori perubahan sosial, perubahan perilaku merupakan proses bertahap yang melibatkan penyadaran, partisipasi, dan pembiasaan (Rogers, 2003). Masyarakat yang terbiasa dengan bantuan instan cenderung pasif, sehingga perlu edukasi berkelanjutan untuk membangun kesadaran dan kemandirian.

b. Sikap (*Attitude*)

Sikap atau *attitude* merupakan respons seseorang terhadap objek tertentu yang biasanya diiringi dengan tindakan. Dalam konteks sosial, sikap menjadi indikator penting untuk memahami bagaimana individu maupun kelompok merespons berbagai fenomena, termasuk program rehabilitasi pascabencana. Menurut Katz dan Stotland, sikap terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu respons kognitif (keyakinan dan persepsi), respons afektif (perasaan emosional), dan respons konatif (kecenderungan perilaku yang didorong oleh hati). Katz juga menjelaskan fungsi sikap dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi fungsi instrumental, fungsi pertahanan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan.

Dalam penelitian ini, sikap masyarakat terhadap program rehabilitasi pascabencana siklon tropis Seroja dianalisis melalui dua aspek utama, yaitu respons masyarakat terhadap program dan tingkat tanggung jawab yang mereka tunjukkan dalam mendukung program tersebut.

Respons Masyarakat terhadap Program Rehabilitasi

Respons masyarakat terhadap program rehabilitasi sangat bervariasi, mulai dari yang menunjukkan dukungan positif hingga yang masih ragu atau menolak. Berdasarkan wawancara dengan Lurah Oebufu, Bapak Zet Batmalo, SH., MH., dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi, seperti pendataan warga terdampak, fasilitasi koordinasi antara pemerintah dan BPBD, sosialisasi kebijakan, serta pendistribusian bantuan secara tepat sasaran.

Demikian pula, Ketua RT 12, Bapak Samuel Kase, menyatakan peran aktifnya dalam menyebarkan informasi kebijakan, memfasilitasi pendataan, dan mendorong partisipasi warga melalui kegiatan gotong royong untuk mendukung program rehabilitasi.

Sementara itu, tanggapan warga penerima bantuan rumah seperti Bapak Nino umumnya positif, terutama bagi mereka yang rumahnya mengalami kerusakan ringan hingga sedang dan telah menerima bantuan perbaikan. Namun, terdapat juga sejumlah warga seperti Bapak Zakeus Safis dan Mama Bernadeta yang belum bersedia pindah ke lokasi relokasi yang disediakan pemerintah karena alasan jarak yang terlalu jauh dari sekolah dan tempat kerja. Hal ini menimbulkan tantangan dalam implementasi program relokasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa respons masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan bantuan, tetapi juga oleh pertimbangan kebutuhan sosial dan ekonomi mereka sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan berbasis *Theory of Planned Behavior* sangat relevan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat, dengan menekankan pentingnya tinggal di lingkungan yang aman serta menjamin akses terhadap fasilitas pendidikan dan pekerjaan.

Dari perspektif *Maslow's Hierarchy of Needs*, kebutuhan dasar akan rasa aman dan keselamatan harus diprioritaskan terlebih dahulu agar masyarakat dapat menerima perubahan lingkungan tempat tinggal dengan lebih baik.

Tingkat Tanggung Jawab Masyarakat

Tanggung jawab masyarakat terhadap program rehabilitasi juga menjadi faktor kunci keberhasilan program. Berdasarkan wawancara, Lurah Oebufu dan Ketua RT 12 sama-sama mengakui pentingnya peran mereka dalam menjaga dan memelihara hasil rehabilitasi, termasuk pengawasan infrastruktur dan mendorong partisipasi warga melalui kegiatan kerja bakti dan edukasi lingkungan.

Namun, sikap tanggung jawab ini belum sepenuhnya tercermin pada semua warga. Beberapa warga terdampak merasa program rehabilitasi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh bahkan penolakan terhadap relokasi.

Kondisi ini dapat dianalisis menggunakan *Diffusion of Innovations Theory*, yang mengemukakan bahwa adopsi program inovasi oleh masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keunggulan relatif, kesesuaian dengan nilai dan kebutuhan, kompleksitas pemahaman, kemampuan uji coba, dan keterlihatan hasil yang positif. Untuk itu, sosialisasi yang intensif, transparan, dan komunikatif sangat dibutuhkan agar warga dapat memahami tujuan dan manfaat program secara mendalam.

Pemerintah disarankan menggunakan bahasa dan media yang mudah dipahami serta melibatkan tokoh masyarakat yang dipercaya untuk menyampaikan informasi, sehingga program rehabilitasi dapat diterima dan dilaksanakan secara sukarela dan berkelanjutan.

c. **Praktik atau Tindakan (*Practice*)**

Benyamin Bloom (2012) membagi perilaku manusia menjadi tiga domain utama sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam perkembangan selanjutnya, teori Bloom ini dimodifikasi untuk pengukuran hasil pendidikan kesehatan yang terdiri atas pengetahuan, sikap, dan praktik atau tindakan. Tindakan merupakan realisasi nyata dari pengetahuan dan sikap yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, tindakan adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk nyata atau terbuka (Notoadmodjo, 2012). Respon ini tergantung pada bagaimana seseorang memaknai rangsangan tersebut, sehingga perilaku yang muncul bisa bersifat sederhana maupun kompleks.

Secara teoritis, tingkah laku dapat dibedakan menjadi sikap dan tindakan. Sikap diartikan sebagai kecenderungan potensi untuk mengadakan reaksi tingkah laku, yang belum tentu langsung terwujud dalam tindakan nyata. Agar sikap menjadi tindakan nyata, diperlukan faktor pendukung atau fasilitas yang memungkinkan terjadinya praktik tersebut (Ahmadi, 2003). Menurut Notoadmodjo (2005), tindakan adalah gerakan atau perbuatan yang dilakukan setelah menerima rangsangan atau adaptasi terhadap lingkungan, baik dari dalam maupun luar tubuh.

Praktik atau tindakan memiliki tingkatan yang berbeda-beda, yaitu:

1. **Persepsi**, yaitu kemampuan mengenal dan memilih objek yang sesuai untuk tindakan yang akan dilakukan. Pada tahap ini individu mampu memberikan respons yang terarah dan benar sesuai contoh.
2. **Mekanisme**, dimana individu dapat melakukan tindakan secara otomatis atau sudah menjadi kebiasaan tanpa harus memikirkan secara mendalam.
3. **Adaptasi**, yaitu tindakan yang sudah berkembang dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan tanpa mengurangi kebenaran dari tindakan tersebut.

Untuk menganalisis perilaku masyarakat dari sisi praktik atau tindakan, perlu diperhatikan aspek penerimaan dan penolakan terhadap suatu kebijakan. Aspek penerimaan tercermin dalam partisipasi aktif dan adopsi kebijakan, sedangkan aspek penolakan dapat muncul melalui resistensi, apatisisme, atau bahkan tindakan yang bersifat kontraproduktif terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Penerimaan

Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan rehabilitasi dampak bencana siklon tropis dapat dilihat dari respon positif yang menunjukkan partisipasi aktif dan adaptasi terhadap kebijakan tersebut. Penerimaan ini biasanya terjadi jika masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, dan rasa aman. Namun, penerimaan tidak selalu otomatis; faktor-faktor seperti kejelasan informasi, kepastian hukum (misalnya sertifikat tanah), serta dukungan ekonomi dan sosial sangat menentukan tingkat penerimaan masyarakat.

Menurut teori kebutuhan Maslow, penerimaan akan lebih mudah terjadi jika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, seperti kebutuhan rasa aman, kepastian hukum, dan kebutuhan ekonomi yang menunjang keberlangsungan hidup mereka. Selain itu, teori kepercayaan sosial menegaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat memengaruhi kesediaan mereka untuk menerima dan beradaptasi terhadap kebijakan baru.

Penolakan

Penolakan masyarakat terhadap kebijakan rehabilitasi dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain kekhawatiran terhadap akses ekonomi, keterikatan emosional dengan lingkungan lama, ketidakpastian status hukum lahan, dan keterbatasan fasilitas pendukung seperti transportasi dan

layanan pendidikan. Penolakan ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan kondisi kebijakan yang diterapkan.

Dari sudut pandang teori kebutuhan Maslow, penolakan muncul apabila kebutuhan dasar masyarakat seperti rasa aman dan keterikatan sosial (*belongingness*) tidak terpenuhi akibat kebijakan yang dianggap mengganggu akses pendidikan, pekerjaan, dan stabilitas keluarga. Sementara itu, teori utilitas rasional menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memilih opsi yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya sosial dan ekonomi paling kecil. Jika relokasi dianggap membawa beban lebih besar daripada manfaatnya, maka masyarakat akan menolak kebijakan tersebut.

Untuk mengurangi penolakan, pemerintah perlu memberikan jaminan kepastian hukum, meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kebijakan secara terbuka dan berkelanjutan, serta menyediakan dukungan transportasi dan ekonomi yang memadai. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat sehingga implementasi kebijakan berjalan lebih lancar dan efektif.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perilaku masyarakat Kelurahan Oebufu dalam menyikapi kebijakan rehabilitasi pascabencana Siklon Tropis Seroja sangat beragam dan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran, sikap, dan tindakan mereka terhadap program yang dilaksanakan. Meskipun sebagian masyarakat menunjukkan respons positif dan partisipasi aktif, masih terdapat kelompok yang bersikap pasif atau menolak kebijakan karena ketidakpuasan terhadap pelaksanaan, kurangnya transparansi, serta keterbatasan akses informasi. Faktor ekonomi dan sosial, seperti keterjangkauan lokasi relokasi dan kebutuhan dasar, turut memengaruhi sikap dan praktik masyarakat. Kurangnya komunikasi partisipatif dan edukasi kontekstual menyebabkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan respons masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, pemerintah perlu memperkuat komunikasi dua arah, melibatkan tokoh lokal, dan menyesuaikan pendekatan kebijakan dengan kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat setempat agar tercipta kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam membangun kembali kehidupan pascabencana.

Daftar Pustaka

- Adiwijaya, C. (2017). *Pengaruh pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana tanah longsor di Kota Bogor* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Universitas Indonesia.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2008). *Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana*. Jakarta: BNPB.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (2020). *Laporan Tahunan Penanggulangan Bencana Daerah*. Kupang: BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- BPBD Kota Kupang. (2021). *Laporan Dampak Bencana Siklon Tropis Seroja di Kota Kupang*. Kupang: Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Esterberg, K. G. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryani, S. (2012). *Meteorologi dan Klimatologi Tropis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Pemerintah Kota Kupang. (2021). *Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah*. Kupang: Pemkot Kupang.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pramono, E., & Suranto. (2021). Partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 15–26.
- Satori, D., & Komariah, A. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Skinner, B. F. (1953). *Science and Human Behavior*. New York: Macmillan.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifulloh, M. (2015). Analisis sistem siklon tropis dan dampaknya terhadap cuaca ekstrem di Indonesia. *Jurnal Meteorologi dan Geofisika*, 16(2), 115–126.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Wahyuni, S. (2018). *Implementasi kebijakan relokasi pasca-erupsi Gunung Sinabung* [Tesis tidak dipublikasikan]. Universitas Gadjah Mada.
- Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. *Psychological Review*, 20(2), 158–177.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.